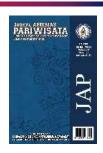
Jurnal eISSN 2685 7731

Abdimas Pariwisata

Vol. 5 No. 1 Tahun 2024

Pemetaan Kepentingan dan Relasi Stakeholder dalam Pengembangan Wisata Kebun Rojo Camp Kabupaten Malang

*Hidayatul Ana Bella¹, Imarotul Mahbubah², Mauliya Safira³, Muh. Rifqi Ramadhan⁴, Nisa Diah Silvana⁵, Noor Safina Wahyuni⁶



Informasi artikel	ABSTRAK
Sejarah artikel Diterima : 10 Mei 2023 Revisi : 10 Desember 2023 Dipublikasikan : 15 Januari 2024 Kata kunci: Desa Wisata, Stakeholder, Pengembangan.	Hasil dari penelitian adalah kebun rojo yang berlokasi di Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dibangun oleh masyarakat setempat dengan tujuan untuk memberdayakan diri sendiri dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kelas bawah atau butuh di sekitar lokasi. Meskipun kebun rojo masih belum terdaftar sebagai sebuah usaha yang resmi di KPH, pihak pengelola berharap bahwa dengan bantuan mahasiswa, proses perizinan akan segera terselesaikan dan kebun rojo dapat berdiri dengan resmi. Pihak pengelola tidak ingin bekerja sama dengan pihak luar atau investor karena pengalaman buruk saat bekerja sama dengan investor dalam pengelolaan Coban Parang Tejo.
Keywords:	ABSTRACT Mapping of Interests and Stakeholder Relations in the Development of
Tourism Village, Stakeholder, Development	Rojo Camp Garden Tourism in Malang Regency The results of the research are that the Rojo Garden located in Gadingkulon Village, Dau District, Malang Regency was built by the local community with the aim of empowering themselves and providing jobs for the lower class or needy people around the location. Even though Rojo Gardens is still not registered as an official business at the FMU, the management hopes that with the help of students, the licensing process will soon be completed and Rojo Gardens can be officially established. The management does not want to work with outsiders or investors because of bad experiences when working with investors in the management of Coban Parang Tejo.

Pendahuluan

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan program besutan Perum Perhutani yang tujuannya adalah untuk dapat mengelola sumber daya dan potensi yang ada di hutan bersama dengan masyarakat Desa Hutan. Dasar hukum dari program ini adalah Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 136/KTPS/DIR/2001 dan disempurnakan melalui Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 682/KTPS/DIR/2009 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM PLUS) yakni sistem pengelolaan hutan dengan kolaborasi antara Perhutani dan LMDH untuk dapat memanfaatkan sumber daya hutan dengan optimal (Bagaskara & Tridakusumah, 2021).

Dilansir dari laman Perhutani diketahui bahwa Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Malang menaungi kawasan hutan seluas 90.360,80 Ha, yang terbagi atas 46.195,90 Ha hutan produksi dan 44.164,90 hutan lindung. Dengan hutan yang cukup luas dan dikelilingi oleh 138 desa hutan maka interaksi antara hutan yang dikelola KPH dengan masyarakat yang ada di sekitar tidak bisa dihindarkan. Pihak KPH menggandeng masyarakat sekitar untuk menggali potensi alam dengan harapan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memfasilitasi munculnya usaha mandiri masyarakat sekaligus untuk memelihara hutan.

© 0 0 EY SA

DOI: 10.36276/jap.v5i1.462

¹⁻⁶ Program Studi Pendidikan Sosiologi, Malang, Indonesia, *email: hidayatul.ana.2107516@students.um.ac.id*

Dalam pemanfaatan suatu daerah sebagai sebuah kawasan wisata maka perlu adanya ikut serta dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan serta wewenang di dalamnya. Pemerintah yang memiliki fungsi sebagai pemberi fasilitas serta pembuat kebijakan dalam kegiatan kepariwisataan. Pihak swasta atau pelaku usaha yang memiliki modal serta jaringan yang berperan sebagai pelaksana kegiatan kepariwisataan. Serta masyarakat yang memiliki potensi berupa alam, budaya, dan tradisi sebagai tuan rumah yang memiliki peran penting dalam pemanfaatan potensi daerah alam sekitarnya (Novanda, 2019). Namun, upaya pengembangan daerah wisata sering kali mengalami hambatan dan tantangan berupa dominasi dari pihak tertentu, perbedaan kepentingan dan tujuan, serta akses yang sulit dalam pemanfaatan sumber daya, selain itu ketidakpastian dalam hal keuntungan juga sering menghambat proses pengembangan dan permasalahan ini dapat diatasi dengan kerja sama dan partisipasi yang baik antar aktor yang ada (Ariyani, Fauzi, dan Umar, 2020). Pemanfaatan sumber daya yang semena-mena dan tidak adil oleh sejumlah aktor diakibatkan oleh ketidaksetaraan kekuasaan yang ada dalam hubungan antar aktor tersebut (Febryano, *et.al.*, 2015).

Aktor merupakan pihak yang berperan dalam sebuah masyarakat serta terkait dengan isu dan permasalahan yang ada di masyarakat. Sebagai pihak yang berpengaruh aktor memiliki kepentingan dan pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Teori strukturasi yang dikemukakan Anthony Giddens merupakan konsep pendekatan sosio kultural tentang bagaimana kita memahami makna, norma, peraturan, serta peran yang muncul dalam kegiatan interaktif. Teori ini juga memberikan penjelasan mengenai konsep agen dan struktur yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi aktor yang terlibat dalam proses pengembangan daerah wisata (Handono, 2020). Agen atau aktor dalam teori strukturasi dipahami sebagai makhluk yang dapat berpikir dan menentukan tindakannya sendiri jadi agen dapat keluar atau meninggalkan suatu struktur apabila dirasa tidak lagi memberikan manfaat, agen juga dapat memelihara struktur apabila dirasa menguntungkan bagi dirinya (Giddens, 1984). Agen dalam konteks pengembangan daerah wisata adalah aktor dan individu yang bertindak aktif di dalamnya. Dalam penelitian ini aktor yang berperan penting dalam pengembangan Kebun Rojo sebagai destinasi wisata akan dipetakan dan dicari apa saja kepentingan dan peran dari para aktor tersebut.

Pada penelitian oleh Yusuf Surya Novanda dengan judul "Peran Aktor dalam Pengelolaan Goa Jlamprong sebagai Daya Tarik Desa Wisata Mojo di Ngeposari Semanu Gunungkidul" dalam Jurnal Program Studi Administrasi Publik UNY. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterlibatan para aktor serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam pengelolaan Wisata Goa Jlamprong. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa para aktor yang terlibat sebagai *key player* padalah Dinas Pariwisata serta pihak swasta, masyarakat sebagai *context setters*, pemerintah desa sebagai *subject*, sementara pemerintah kecamatan sebagai *crowd*. Hambatan yang ada adalah kurangnya fasilitas pendukung yang ada di daerah Goa Jlamprong serta upaya pemasaran yang masih terbatas sehingga masih sedikit wisatawan yang berkunjung (Novanda, 2019).

Penelitian oleh Yunindyawati, Tri Agus Susanto, Eva Lidya, Lili Erlina, dan Maulana dengan Judul "Pemetaan Aktor dan Jaringan Hubungan Antar Aktor dalam Pembangunan Pedesaan" dalam Jurnal Penyuluhan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi posisi dan peran para aktor yang terlibat dalam proses pembangunan wilayah pedesaan berbasis ekologi rawa lebak pada desa Uluk Kembahang 1 Kecamatan Pemulutan Barat Ogan Ilir Sumatera Selatan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa selain pemerintahan desa, masyarakat juga berperan dalam proses pembangunan desa. Masyarakat disini terdiri dari antara lain tokoh masyarakat, karang taruna, PKK, pengusaha UMKM tenun songket, ketua PKH hingga kelompok majelis taklim (Yunindyawati et. al. 2022).

Penelitian oleh Indra Gumay Febrayano, Didik Suharjito, Dudung Darusman, Cecep Kusmana, dan Aceng Hidayat dengan judul "Aktor dan Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan Mangrove di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia" dalam Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan aktor serta relasi kuasa yang ada dalam pengelolaan mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah setempat belum berhasil dengan baik dan efektif dimana pengusaha dapat mengubah mangrove menjadi tambak udang intensif. LSM dan masyarakat sudah berusaha untuk menghentikan konversi lahan tersebut namun tidak kuat menghadapi pengusaha. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah kabupaten dan masyarakat untuk memastikan mangrove dapat dikelola dengan baik dan tetap lestari (Febryano et. al., 2015).

Sebagaimana telah disinggung dalam kajian literatur terdahulu dimana penelitian tentang agen serta aktor yang berperan dalam pengembangan daerah wisata belum terdapat identifikasi interaksi antar aktor yang terdapat dalam suatu struktur yang dimana hubungan antar struktur dan aktor tidak bisa dipisahkan dalam pengembangan wisata. Kebanyakan penelitian masih mengkaji terkait apa saja peran dan kepentingan aktor yang terlibat dalam pengembangan objek wisata yang meliputi pemetaan aktor dari segi peran dan kepentingan serta hal apa saja yang menghambat pengembangan wisata dari aspek interaksi antar aktor yang terlibat di dalamnya. Kajian mengenai struktur yang ada dalam pengembangan wisata masih belum nampak dari beberapa studi terdahulu yang mengkaji masalah aktor. Bertolak dari hal ini, kajian ini berfokus untuk membahas bagaimana aktor dan struktur yang ada saling mempengaruhi satu sama lain dalam pengembangan wisata Kebun Rojo Camp. Kajian ini membahas mengenai bagaimana dan apa saja kepentingan serta peran aktor dalam pengembangan Kebun Rojo Camp serta bagaimana dinamika hubungan antara struktur dan aktor yang terdapat pada pengembangan Kebun Rojo Camp dari perspektif teori strukturasi Anthony Giddens.

Tabel.1 Penelitian Terdahulu

Ringkasan

Research Gap

Dalam jurnal yang berjudul "Analisis Peran dan Stakeholders dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang" oleh Handayani & Warsono (2017) memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat peran stakeholders dalam upaya pengembangan wisata pantai Karang Jahe, dan merumuskan upaya untuk mengatasi faktor penghambat tersebut.

Dalam penelitian tersebut hanya memaparkan faktor-faktor yang menghambat peran stakeholder dalam pengembangan wisata pantai. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan peneliti bukan hanya saja mengenai peran aktor dalam pengembangan sektor pariwisata akan tetapi juga memaparkan tentang dinamika hubungan antara struktur dan aktor.

Dalam jurnal yang berjudul "Jejaring Kekuasaan Aktor dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat di Provinsi Aceh" oleh Hasnanda (2019) memiliki tujuan untuk menganalisis interaksi dan dinamika aktor dalam jaringan pengelolaan hutan oleh masyarakat lokal melalui pendekatan kekuasaan.

Dalam penelitian tersebut hanya memaparkan mengenai interaksi dan dinamika aktor dalam jaringan pengelolaan hutan. Sedangkan dalam penelitian ini memaparkan peran serta struktur antara aktor dan jaringan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putu Ayu Vindytha Amanda Putri dan Eko Budi Santoso (2020) bahwa Setiap pemangku kepentingan memiliki pengaruh dan kepentingannya sendiri. Kelompok kategori pemangku kepentingan kunci berperan sebagai regulator dan pengontrol sehingga dapat dijadikan sebagai ketua perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan.

Dalam penelitian tersebut hanya membahas mengenai salah satu peran aktor dalam regulasi. Sedangkan dalam penelitian ini memaparkan tentang peran keseluruhan aktor dan jaringan dalam upaya mengembangkan wisata Kebun Rojo Camp.

Pada hasil penelitian Yhani Chrismawati dan R Widodo Dwi Pramono (2021) menyatakan bahwa pengalihan fungsi lahan dari pertanian ke pariwisata dibutuhkan pengelolaan yang tepat agar dapat dikembangkan dengan baik dan benar. Hasil penelitian menunjukkan 4 kategori stakeholder dan yang paling berpengaruh adalah key player yang berasal dari Pemerintah daerah Kabupaten Sleman maupun masyarakat.

Dalam penelitian tersebut memaparkan mengenai urgensi pengelolaan yang tepat dalam pengalihan fungsi lahan dari pertanian ke pariwisata serta aktor yang terlibat dalam pengelolaan tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini pemaparan mencakup pengelolaan yang dilakukan oleh aktor dan jaringan serta dinamika dalam struktur aktor.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Indra Gumay Febryano dkk yang berjudul Aktor dan Relasi Kekuasaan Pengelolaan Mangrove di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia membahas mengenai aktor dan relasi dalam pengelolaan mangrove yang mengalami degradasi lingkungan dan marginalisasi masyarakat lokal akibat politisasi. Kebijakan pemerintah untuk menjaga kawasan mangrove yang telah ditetapkan lemah terhadap pengusaha yang mengubah wilayah konservasi mangrove menjadi tambak udang intensif. Maka dari itu, pihak LSM dan masyarakat sekitar berusaha mengembangkan jejaring yang lebih luas dengan kolaborasi untuk menjaga kelestarian mangrove.

Dalam penelitian tersebut memaparkan slaah satu jaringan yang terlibat dalam pengelolaan menjadi pihak yang menyebabkan terjadinya permasalahan pada pengelolaan serta upaya dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini pemaparan mengenai pihak yang terlibat serta proses regulasi dengan pemerintah setempat juga dipaparkan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gamin, dkk yang berjudul "Menyelesaikan Konflik Penguasaan Kawasan Hutan Melalui Pendekatan Gaya Sengketa Para Pihak di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lakitan membahas mengenai gaya para pihak dalam menghadapi sengketa diperlukan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Pemetaan antara aktor utama dan aktor pendukung sangat diperlukan terutama dalam penyelesaian konflik.

Dalam penelitian tersebut menegaskan urgensi penelitian menggunakan pendekatan melalui konflik yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan dalam penelitian kami lebih mengedepankan pada urgensi peran pemerintah dalam pengelolaan pariwisata.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sayed Fauzan Riyadi yang berjudul "Pemetaan Sosial Desa Payalaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas" membahas tentang pemetaan sosial sangat diperlukkan sebelum melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Didapatkan analisis mengenai aktor yang terlibat dalam pemberdayaan Desa Payalaman.

Dalam penelitian tersebut membahas mengenai urgensi perencanaan dalam penentuan aktor dan relasi yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan. Sedangkan dalam penelitian ini memaparkan mengenai kelanjutan proses regulasi setelah perencanaan antar aktor dilakukan.

Urgensi Penelitian

Belum banyak peneliti yang melakukan pemetaan kepentingan stakeholder di Kebun Rojo serta permasalahan antar aktor dan relasinya di dalam pengembangan wisata Coban Parangtejo yang menjadi Kebun Rojo camp.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan secara detail dan mendalam mengenai bagaimana pemetaan dan relasi para *stakeholder* dalam pengembangan wisata kebun rojo sesuai dengan fakta dari subjek yang diteliti. Selanjutnya pengumpulan data serta memanfaatkan suatu teori sebagai penjelas yaitu menggunakan Teori Strukturasi oleh Anthony Giddens. Teori ini dirasa cocok dalam usaha untuk memetakan aktor dan relasi serta hal yang menjadi kepentingan dari para aktor tersebut. Dalam teori ini Giddens menawarkan pandangan yang belum ditemui sebelumnya yakni suatu pandangan yang menghubungkan struktur dan agensi. Dalam teori ini struktur dan agensi yang ada senantiasa saling mempengaruhi dan hal ini berlangsung secara terus menerus.

Lokasi yang diambil peneliti berada di Kebun Rojo, Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Setelah melakukan observasi, peneliti melihat ada beberapa permasalahan pada lokasi tersebut. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan adanya permasalahan terkait pengembangan wisata dan perizinan dari pihak terkait. Adapun waktu yang ditempuh untuk melaksanakan penelitian selama rentang waktu 2 minggu. Informan dalam penelitian ini berjumlah 1 (satu) orang yang memiliki karakteristik: (1) merupakan pengelola tempat wisata kebun rojo camp; (2) orang yang mengetahui permasalahan pengembangan wisata kebun rojo camp.

Pemilihan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Terdapat satu informan dari kalangan pengelola wisata kebun rojo camp yakni ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Kemudian teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) agar lebih terarah kepada informan penelitian, dan dokumentasi yang berupa foto dan rekaman suara. Ketiga data tersebut digunakan sebagai data primer, serta diperkuat dengan kajian literatur yang relevan sebagai sumber data sekunder untuk mencari referensi dalam penelitian. Selain itu, kajian literature juga dapat digunakan untuk mengkaji beberapa teori dasar yang relevan dengan masalah penelitian yang akan dikaji.

Untuk mengetahui tingkat validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber data yang terdiri dari sumber, waktu, dan metode. Peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi fenomena yang dikaji dari berbagai metode perolehan data dan sumber kajian untuk memperoleh pernyataan yang bersifat faktual. Triangulasi waktu dilakukan untuk mengkaji kembali apakah hasil penelitian akan berbeda jika penelitian dilakukan lagi pada waktu yang berbeda. Triangulasi metode dilakukan dengan cara membandingkan teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu wawancara mendalam dan observasi.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis interaktif dari Miles & Huberman. Dari analisis data model interaktif ini terdapat empat tahapan yaitu : (1) pengumpulan data; (2) reduksi data; (3) menyajikan data; dan (4) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Alasan peneliti menggunakan analisis data interaktif Miles & Huberman karena peneliti ingin mendapatkan kejenuhan data, maka dari hal tersebut penelitian ini akan dilakukan terus menerus sampau tuntas hingga data jenuh.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Aktor dalam Pengembangan Wisata Kebun Rojo

Kebun Rojo merupakan sebuah destinasi wisata yang di dalamnya dapat ditemui kebun jeruk serta *camping ground* dan terbentuk dari usaha masyarakat setempat untuk memberdayakan diri mereka dan memanfaatkan potensi alam yang ada di Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Salah seorang pengelola yang juga berperan sebagai ketua dari kelompok yang mengelola Kebun Rojo yakni Heriyanto menerangkan bahwa tujuan yang ingin ia capai ketika memulai membangun Kebun Rojo Camp ini adalah untuk memberdayakan masyarakat kelas bawah atau buruh dan memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka. Heriyanto menuturkan bahwa Kebun Rojo murni merupakan usaha masyarakat dan sampai wawancara dilakukan belum pernah menerima bantuan dari pihak luar. Kebun Rojo berada pada lahan Perhutani dengan luas sekitar 3 hektar dan pengelolaannya diserahkan pada pihak LMDH Gadingkulon.

Kebun Rojo sampai saat ini masih belum mendapatkan bantuan apa pun dari pihak desa dan tidak berada di bawah naungan desa. Menurut Sepenuturan Informan pihak desa seakan tidak peduli atas usaha LMDH untuk membangun Kebun Rojo. Pihak desa seolah tidak peduli dengan keberadaan Kebun Rojo dan hanya memberikan tanda tangan saja ketika dibutuhkan tanpa memberi dukungan ataupun saran.

LMDH yang mengelola Kebun Rojo ini terdiri atas 5 orang warga yang dulunya juga tergabung dalam LKDPH yang mengelola Coban Parang Tejo. Namun setelah Coban Parang Tejo terbengkalai dan tidak menentu kabarnya. Heriyanto dan beberapa warga berinisiatif untuk membangun Kebun Rojo sebagai sebuah usaha bersama yang tujuannya untuk membuka lapangan pekerjaan untuk warga sekitar. Sampai saat wawancara dilakukan Kebun Rojo belum terdaftar sebagai sebuah usaha yang resmi di KPH dan ini berimbas pada perizinan Kebun Rojo untuk mengeluarkan tiket. Sampai saat ini pengelola hanya menarik uang untuk biaya jasa lingkungan dari pengunjung, jasa lingkungan tersebut termasuk listrik, sarana prasarana, dan fasilitas pendukung lainnya. Pak Heriyanto juga menyebut bahwa bila ada kekurangan untuk biaya perawatan maka akan ditutup dengan uang pribadi. Sebenarnya terdapat dana bantuan dari pemerintah yang dapat digunakan untuk membangun usaha masyarakat semacam Kebun Rojo, namun Pak Heriyanto menerangkan bahwa pengelola masih ingin berjuang dengan usaha mereka sendiri. Pihak pengelola sendiri menerangkan bahwa mereka sudah mengajukan berkas yang dijadikan persyaratan untuk mengeluarkan izin. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pihak KPH terkait hal tersebut. Pihak LMDH juga berharap pada mahasiswa untuk membantu terkait perizinan

tersebut yang diyakini bahwa dengan mahasiswa yang datang dan meminta keterangan ke KPH secara langsung proses perizinan akan segera terselesaikan dan LMDH Kebun Rojo akan berdiri dengan resmi.

Pihak pengelola juga menyebutkan alasan dibalik mengapa mereka memilih untuk tidak bekerja sama dengan pihak luar atau investor. Pihak pengelola masih belum dapat untuk kembali bekerja sama dengan pihak yang disebut investor. Hal ini mungkin berasal dari pengalaman mereka bekerja sama dengan investor dalam pengelolaan Coban Parang Tejo di mana investor yang ada menghilang dan tidak dapat dimintai keterangan terkait kelanjutan kerja sama mereka. Pihak pengelola juga menyebut bahwa sebenarnya mereka sudah menghubungi pihak investor Coban Parang Tejo sebanyak dua kali untuk meminta keterangan akan tetapi belum mendapat jawaban yang pasti. Pengelola sebenarnya berharap agar Coban Parang Tejo tersebut dilepaskan dari kontrak yang ada dan dapat dikelola oleh masyarakat setempat serta menambah destinasi wisata Kebun Rojo dan agar potensi yang ada pada Coban tersebut tidak sia-sia dan terbengkalai begitu saja.

Peran Aktor Sosial dalam Pengembangan Wisata Coban Parang Tejo

LMDH sendiri sangat berperan dalam pengembangan wisata Coban Parang Tejo. Lembaga tersebut telah mengembangkan Coban Parang Tejo yang sebelumnya terbengkalai dikarenakan hilangnya investor yang membiayai tempat wisata tersebut. Sekarang wisata Coban Parang Tejo tersebut dikembangkan kembali oleh LMDH menjadi Kebun Rojo Camp yang berisikan kebun jeruk dan *camping ground*. Akan tetapi dengan adanya Kebun Rojo Camp tersebut tetap saja wisata Coban Parang Tejo masih terbengkalai, dikarenakan tempat wisata tersebut masih terikat oleh investor. LMDH berusaha untuk mengembangkan potensi wisata lainnya yang masih satu wilayah dengan Coban Parang Tejo tersebut. Akan tetapi wisata Kebun Rojo Camp tersebut tidak dapat diresmikan karena masih menunggu surat perizinan dari pihak KPH.

Berdasarkan rumusan masalah pertama dijelaskan bahwa LMDH sendiri terdiri atas 5 orang warga. Beberapa diantara 5 orang tersebut adalah Heriyanto selaku ketua dari lembaga tersebut. Beliau dapat dikatakan sebagai kepala dari pengembangan tempat wisata tersebut. Beliau juga yang menangani beberapa masalah yang terdapat pada tempat wisata tersebut, seperti masalah perizinan tempat wisata oleh KPH. Kemudian Ibu Is selaku marketing dari wisata Kebun Rojo Camp. Beliau juga berperan sebagai admin untuk menghitung pembagian pemasukan seperti dengan KPH, investor, dan juga untuk memberikan gaji untuk karyawan. Aktor sosial berikutnya yaitu KPH yang berperan sebagai pemberi izin tempat wisata. Melalui pemberian izin tersebut pihak KPH juga mendapatkan sekitar 70% dari hasil pemasukan wisata Kebun Rojo Camp tersebut. Setelah diberikan surat izin, pihak KPH juga harus melakukan kunjungan pemeriksaan setiap satu bulan untuk mengetahui perkembangan tempat wisata tersebut.

Tabel.2 Orientasi Stakeholder

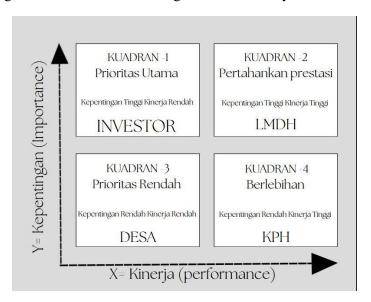
No.	Orientasi Stakeholder	Penyelesaian
1.	Mengembangkan wilayah sekitar wisata Coban Parang Tejo yang terbengkalai untuk tetap bertahan pada sektor pariwisata	Memisahkan wilayah tempat wisata dan mengembangkan tempat wisata yang masih potensial dan mengambil pemasukan melalui uang "jaga motor" dan kebersihan lingkungan sekitar. Pihak lembaga sejauh ini masih menunggu perizinan dari pihak KPH dan kepastian dari pihak investor.
2.	Mencoba untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan adanya wisata Kebun Rojo Camp	

Sumber: Data Primer (2023)

Kepentingan yang Dimiliki oleh Setiap Aktor dalam Pengembangan Wisata Kebun Rojo

Posisi pada setiap kuadran dapat menggambarkan ilustrasi mengenai posisi dan kepentingan yang dilakukan oleh masing-masing stakeholder dalam pengembangan wisata Kebun Rojo.

Kuadran 1 berada di bagian kiri atas diagram, kuadran ini menunjukkan *stakeholder* dengan kepentingan tinggi dan kinerja yang rendah. *Stakeholder* yang termasuk dalam diagram tersebut adalah investor dari CV. R yang kepentingannya tinggi namun kinerjanya rendah. Kinerja rendah dari invsetor sendiri dikarenakan investor tidak bertanggung jawab atas kontrak yang telah dilakukan dengan LKDPH untuk membangun wisata utama yaitu coban Parang Tejo.



Gambar 1. Pemetaan Kepentingan Aktor

Kuadran 2 berada di bagian kanan atas diagram, kuadran ini menunjukkan *stakeholder* dengan kepentingan tinggi dan kinerja tinggi. *Stakeholder* yang termasuk dalam diagram tersebut adalah LMDH Wonoasri yang memiliki kepentingan tinggi dan kinerja tinggi. Kepentingan LMDH Wonoasri yaitu mengembangkan potensi wisata yang masih satu wilayah dengan coban Parang tejo dan Kebun Rojo dengan memberdayakan masyarakat desa yang memiliki keinginan untuk bekerja. Namun tidak banyak masyarakat yang mau ikut serta dalam mengembangkan wisata tersebut.

Kuadran 3 berada di bagian kiri bawah diagram, kuadran ini menunjukkan *stakeholder* dengan kepentingan rendah dan kinerja rendah. *Stakeholder* yang termasuk dalam diagram kuadran 3 adalah pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki kepentingan rendah dan kinerja rendah dikarenakan pemerintah desa tidak ikut terlibat pada pengelolaan wisata dan pengelolaan wisata diserahkan sepenuhnya kepada LMDH.

Kuadran 4 berada di bagian kanan bawah diagram, kuadran ini menunjukkan *stakeholder* dengan kepentingan rendah dan kinerja tinggi. *Stakeholder* yang termasuk dalam diagram tersebut adalah KPH Malang. KPH Malang berperan untuk perumusan kebijakan, karena memiliki kepentingan rendah dan

pengaruh tinggi dalam pengelolaan wisata. KPH sendiri berperan sebagai penerbit surat perizinan untuk pengelolaan tempat wisata lebih lanjut.

Analisis Teori Strukturasi Anthony Giddens Berdasarkan Pemetaan Kepentingan dan Relasi Stakeholder dalam Pemgembangan Wisata Kebun Rojo Camp

Kebun Rojo yang merupakan tempat wisata yang dibangun dengan swadaya Lembaga Masyarakat Desa Hutan Wonosari dengan tujuan untuk memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitar desa Gadingkulon merupakan sebuah tempat bagi para pegiat untuk bersama-sama memanfaatkan potensi alam untuk kemajuan kelompok mereka secara khusus dan desa Gadingkulon secara umum. Pihak pengelola hanya terdiri dari beberapa warga dan masih belum terdapat pihak lain yang membantu dan mendukung pengembangan Kebun Rojo. Menurut penuturan informan dari pihak pengelola Kebun Rojo selama ini pengelolaan, perawatan, dan pengembangan tempat tersebut masih dipegang oleh LMDH dan belum mendapat bantuan apa pun dari siapa pun, ini termasuk dari pihak desa yang masih belum menyalurkan tangannya.

Pihak pengelola juga menuturkan bahwa terdapat air terjun di dekat area Kebun Rojo yang dapat dimanfaatkan dan menjadi daya tarik juga. Namun, karena terdapat kontrak antara pengelola air terjun dengan Perhutani maka pihak Kebun Rojo tidak bisa mengelola air terjun tersebut. Pihak investor yang seharusnya bertanggung jawab atas air terjun tersebut sudah tidak bisa dihubungi dan sudah tidak lagi kembali serta seolah lepas tangan. Dari sini juga pihak Kebun Rojo menjadi ragu untuk kembali bekerja sama dengan pihak ketiga seperti investor. Karena selain adanya faktor ketidakpastian seperti yang terjadi pada air terjun Parang Tejo, pengelola menuturkan bahwa masyarakat hanya akan dinomorduakan dan menjadi buruh serta tidak bisa bebas untuk mengelola tempat tersebut.

Anthony Giddens menuturkan bahwa struktur dan agen akan senantiasa saling memengaruhi satu sama lainnya. Dalam artian bahwa struktur dapat menghambat maupun memfasilitasi tindakan agen, dalam hal ini struktur merupakan suatu hasil dari proses sosial dan juga merupakan sarana praktik sosial. Giddens menekankan bahwa agen dalam strukturasi merupakan suatu entitas yang mampu berpikir mandiri dan dapat memilih untuk melanjutkan suatu struktur atau menghentikannya.

Kebun Rojo merupakan bentuk struktur kecil yang di mana para agen di dalamnya berusaha untuk membangun suatu destinasi yang dapat memfasilitasi tujuan mereka yakni untuk dapat mensejahterakan kaum buruh dan untuk memberdayakan mereka. Di sisi lain karena pihak desa merasa tidak dapat potensi yang menjanjikan dari Kebun Rojo ini maka mereka belum mau untuk bekerja sama. Hal ini menunjukkan bahwa agen yang dalam hal ini yakni LMDH dan pihak desa bertindak dengan hasil rasionalitas mereka masing-masing. Kebun Rojo dikembangkan oleh LMDH yang merasa bahwa Kebun Rojo dapat memfasilitasi apa yang mereka inginkan dan begitu juga sebaliknya di mana pihak desa memilih untuk tidak terlibat karena tidak ada urgensi yang ada dalam pengembangan Kebun Rojo.

Demikian halnya dengan air terjun Parang Tejo yang pernah dikelola oleh LKDPH beserta investor yang dimana air terjun tersebut dirasa sudah tidak lagi dapat memenuhi tujuan dari investor dan karena hal tersebut pihak investor memilih untuk menghilang dan mengabaikan Parang Tejo. Uniknya dari beberapa orang yang tergabung dalam LKDPH yang mengelola air terjun Parang Tejo beberapa diantaranya memilih untuk bertahan namun tidak lagi dalam pengelolaan air terjun akan tetapi mendirikan destinasi baru yakni Kebun Rojo. Di sini membuktikan bahwa agen dapat memilih untuk melanjutkan ataupun meninggalkan suatu struktur sesuai dengan kapasitas rasionalnya dalam mempertimbangkan apakah suatu struktur akan memampukan atau menghambatnya. Pengelola Kebun Rojo memilih untuk berhenti dan bertahan di waktu yang sama. Mereka berhenti dalam pengelolaan air terjun namun bertahan untuk membentuk badan baru dan melanjutkan upaya pemberdayaan masyarakat melalui Kebun Rojo.

Simpulan

Kebun Rojo yang berlokasi di Desa Gadingkulon, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dibangun oleh masyarakat setempat dengan tujuan untuk memberdayakan diri sendiri dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat kelas bawah atau buruh di sekitarnya. Meskipun Kebun Rojo masih belum terdaftar sebagai sebuah usaha yang resmi di KPH, pengelola telah mengajukan berkas persyaratan untuk

mengeluarkan izin, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pihak KPH terkait hal tersebut. Pihak pengelola berharap bahwa dengan bantuan mahasiswa, proses perizinan akan segera terselesaikan dan Kebun Rojo dapat berdiri dengan resmi. Pihak pengelola tidak ingin bekerja sama dengan pihak luar atau investor karena pengalaman buruk saat bekerja sama dengan investor dalam pengelolaan Coban Parang Tejo. Selain itu, LMDH berperan penting dalam pengembangan wisata Coban Parang Tejo yang sekarang menjadi Kebun Rojo Camp.

Referensi

- Ariyani, N., Fauzi, A., & Umar, F. (2020). Model Hubungan Aktor Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Kedung Ombo. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 357-378. DOI:10.24914/jeb.v23i2.3420
- Bagaskara, F., & Tridakusumah, A. C. (2021). Dinamika Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (Studi Kasus LMDH Tani Mukti Giri Jaya, Desa Makermanik, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis*, 805-823. DOI: http://dx.doi.org/10.25157/ma.v7i1.4823
- Chrismawati, Y., & Pramono, R. D. (2021). Pemetaan Stakeholder yang Berperan dalam Pengembangan Agrowisata Minapadi Samberembe. *Jurnal Riset Pembangunan*, 26-46. DOI: https://doi.org/10.36087/jrp.v4i1.84
- Febryano, I. G., Suharjito, D., Darusman, D., Kusmana, C., & Hidayat, A. (2015). Aktor dan Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan Mangrove di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 123-138. DOI: 10.20886/jakk.2015.12.2.125-142
- Gamin, G., Kartodihardjo, H., Kolopaking, L. M., & Boer, R. (2014). Menyelesaikan Konflik Penguasaan Kawasan Hutan Melalui Pendekatan Gaya Sengketa Para Pihak Di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lakitan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 71-90. DOI: 10.20886/jakk.2014.11.1.71-90
- Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. California: University of California Press. ISBN: 9780520057289
- Handayani, F., & Warsono, H. (2017). Analisis Peran Stakeholders dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe di Kabupaten Rembang. *Journal Of Public Policy and Management Review*, 40-53. DOI: 10.14710/jppmr.v6i3.16543
- Handono, S. Y. (2019). Transformasi Sosial Desa Adat Menjadi Desa Wisata Edelweis: Perspektif Teori Strukturasi "Anthony Giddens". *Agribusiness Journal*, 53-73. DOI: https://doi.org/10.15408/aj.v13i2.13953
- Hasnanda, O. (2019). Jejaring Kekuasaan Aktor dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Berbasis Masyarakat di Provinsi Aceh. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 380-393. DOI: https://doi.org/10.29244/jpsl.9.2.380-393
- Novanda, Y. F. (2019). Peran Aktor dalam Pengelolaan Goa Jlamprong sebagai Daya Tarik Desa Wisata Mojo di Ngeposari Semanu Gunung Kidul. *E-Jurnal Program Studi Administrasi Publik*, 1-12. Source: https://journal.student.uny.ac.id/index.php/joppar/article/view/19294
- Putri, P. V., & Santoso, E. B. (2020). Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Kawasan Cagar Budaya sebagai Destinasi Wisata Kota Pontianak. *Jurnal WIlayah dan Lingkungan*, 202-213. DOI: https://doi.org/10.14710/jwl.8.3.202-213
- Riyadi, S. F. (2023). Pemetaan Sosial Desa Payalaman Kecamatan Palmatak Kabupaten Kepulauan Anambas. *Jurnal Abdimas Multidisipli*, 52-57. DOI: https://doi.org/10.58705/jam.v2i2.156
- Setiawan, J. (2019, Januari 18). *Mengupas 9 Bagian Penting dalam Pemetaaan Sosial (Social Mapping) untuk PROPER*. Diambil kembali dari Peksos dan Proper: https://peksosdanproper.home.blog/2019/01/18/mengupas-9-bagian-penting-dalam-pemetaan-sosial-social-mapping-untuk-proper/
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Jakarta: Alfabeta.

Turner, J. H. (1986). Review: The Theory of Struvturation. *American Journal of Sociology*, 969-977. Source: https://www.jstor.org/stable/2779966

Yunindyawati, Susanto, T. A., Lidya, E., & Maulana. (2022). Pemetaan Aktor dan Jaringan Hubungan Antar Aktor dalam Pembangunan Pedesaan. *Jurnal Penyuluhan*, 307-322. DOI: https://doi.org/10.25015/18202238766